

**TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/
PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON
(CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**



Penulisan Hukum
(Skripsi)

Disusun dan Diajukan untuk

**Melengkapi Persyaratan Guna Meraih Derajat Sarjana S1 dalam Ilmu Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta**

Oleh :

Ruth Indah Pertiwi

NIM. E0012350

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Penulisan Hukum (Skripsi)

**TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/
PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON
(CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**

Oleh :

Ruth Indah Pertiwi

NIM. E0012350

Disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)
Fakultas Hukum Universitas Sebeias Maret Surakarta

Surakarta, Mei 2016

Dosen Pembimbing I,



Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum.
NIP. 197980501200312 1 002

Dosen Pembimbing II,



Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19700621200604 2 001

PENGESAHAN PENGUJI

Penulisan Hukum (Skripsi)

TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/
PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON
(CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH)

Oleh :

Ruth Indah Pertiwi

NIM. E0012350

Telah diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi)

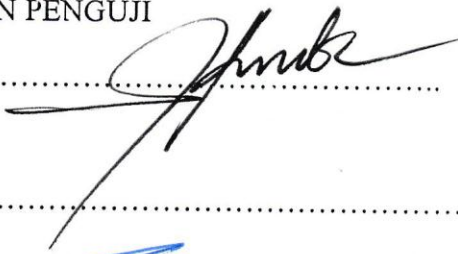

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

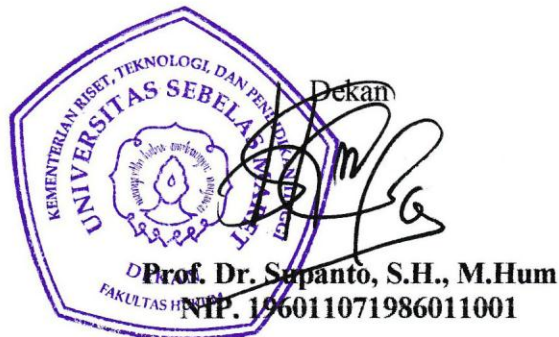
Pada :

Hari : SENIN

Tanggal : 30 JANUARI 2017

DEWAN PENGUJI

1. SURANTO, S.H., M.H. : 
Ketua
2. Dr. KHARYANTO, S.H., M.Hum. :
Sekretaris
3. SUNNY UMUMU FIDRUSY, S.H., M.H. : 
Anggota



SURAT PERNYATAAN

Nama : Ruth Indah Pertiwi

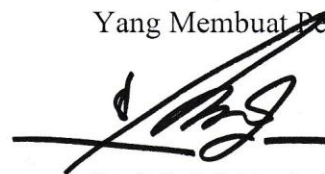
NIM : E0012350

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) berjudul :

TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON (CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH) adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Surakarta, 11 Mei 2016

Yang Membuat Pernyataan



Ruth Indah Pertiwi

E0012350

KATA PENGANTAR

Salam Sejahtera,

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan segala karunia, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (Skripsi) yang berjudul **TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/ PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON (CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH)**. Penulisan hukum ini bertujuan untuk melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan guna meraih gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Penulisan Hukum (Skripsi) ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu pada halaman ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus atas hikmat dan penyertaan-Nya kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Prof. Dr. Supanto, S.H., M.Hum yang memberikan kemudahan kepada penulis dalam proses belajar dan menyelesaikan penulisan hukum ini.
3. Bapak Suranto, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara dan selaku Ketua Penguji Skripsi yang telah memberikan bimbingan dan pencerahan bagi penulis.
4. Bapak Dr. Isharyanto, S.H., M.Hum. selaku pembimbing skripsi I yang memberikan bimbingan, nasehat, dan arahan selama proses penulisan hukum ini.
5. Ibu Sunny Ummul Firdaus, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi II yang telah memberikan bimbingan penuh selama penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Achmad, S.H. selaku Pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan pengarahan dan bimbingan selama di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
7. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret yang telah banyak membantu penulis selama proses penulisan hukum.
8. Kedua Orang Tua penulis, Bapak Sri Yanta, S.E., M.M. dan Ibu Martini BR Sembiring, S.Pd., serta saudara- saudara penulis Hizkia Ivan Samudra, Hana Ayu Pertiwi, Abraham Wicaksono, dan T. Moseshine Lamborghini yang selalu memberikan waktu, tenaga, dan motivasi bagi penulis di segala aspek kehidupan.
9. Sahabat penulis Hana Ayu Pertiwi yang selalu bersedia sebagai teman “diskusi apapun” tanpa terikat ruang dan waktu, serta M. Ghoza Farghani yang bersedia mendengar segala “celotehan” penulis dan menjadi teman debat penulis dalam menyusun penulisan hukum ini.
10. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret angkatan 2012 Hana, Nike, Laksari dan teman-teman yang tidak dapat penulis sebutkan

satu persatu yang telah memberikan dukungan dan inspirasi selama penulis kuliah.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat kemampuan Penulis yang masih sangat terbatas. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penulisan hukum ini dan kedepannya akan penulis terima dengan lapang hati. Semoga penulisan ini dapat bermanfaat dalam kemajuan hukum di Indonesia.

Surakarta, 11 Mei 2016

Penulis,



Ruth Indah Pertiwi

E0012350

ABSTRAK

Ruth Indah Pertiwi. 2012. E0012350. TELAAH KRITIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 100/ PUU- XIII/2015 TERKAIT SYARAT JUMLAH PASANGAN CALON (CALON TUNGGAL PEMILIHAN KEPALA DAERAH). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

Penelitian ini menelaah permasalahan, pertama bagaimana telaah terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/ 2015 terkait syarat jumlah pasangan calon secara substansinya. Kedua, Problematika apa yang dihadapi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 100/ PUU-XIII/ 2015 terkait syarat jumlah pasangan calon dan apakah solusinya.

Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum Normatif bersifat penelitian preskriptif. Jenis data sekunder meliputi bahan hukum Primer dan sekunder. Teknik Pengumpulan Data yang digunakan Teknik Pengumpulan data studi pustaka dari media cetak maupun media elektronik. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deduktif.

Hasil penelitian secara substansi Mahkamah berwenang dalam menangani permohonan pengujian UU No 8 Tahun 2015 terhadap UUD 1945 terkait syarat jumlah pasangan calon dalam Pilkada diputuskan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII//2015. Munculnya calon tunggal dalam Pilkada sebagai problematika tersendiri dalam pelaksanaan Pilkada serentak periode 2015, kekosongan hukum atas calon tunggal dalam pilkada, terancam Pilkada ditunda pada periode berikutnya, hak konstitusional rakyat menjadi pertimbangan penting berlandaskan pada kedulatan rakyat dan nilai demokratis Pilkada. Calon tunggal dalam demokrasi Indonesia sebagai anomali dalam proses tercapainya demokrasi yang berkualitas. Calon tunggal menekan tingkat kontestasi dalam demokrasi yang berakibat pada kualitas demokrasi, solusi terbaik dengan menangani tidak timbulnya calon tunggal dalam Pilkada selanjutnya.

Kata Kunci : Calon Tunggal, Kontestasi, Demokrasi

ABSTRACT

Ruth Indah Pertiwi. 2012. E0012350. A critical study of the ruling of the Constitutional Court the number 100/ PUU-XIII//2015 related terms candidate number (single candidate election Head Area). Legal Writing (Thesis). Faculty Of Law Sebelas Maret University Surakarta

This study examines the first problem, how to review against the ruling of the Constitutional Court the number 100/PUU-XIII/2015 related terms the number of candidates in its substance. Second, what Problems faced in the implementation of the ruling of the Constitutional Court the number 100/PUU-XIII/2015 related terms candidate number and whether the solution.

Legal research this Normative legal research is overwhelmingly prescriptive. Secondary data types include primary and secondary legal materials. The technique of Data collection that is used for library studies data collection Techniques from the media, both print and electronic media. Data analysis technique used is the deductive method.

Results of the study was substantially a systematic interpretation of the Court used in handling the application for testing the law No. 8 year 2015 against Constitution related terms the number of candidates in the elections. The emergence of a single candidate in the elections as its own problems in the implementation of concurrent Elections period 2015, void the law over a single candidate in the elections, threatened the elections postponed in the following period, the right konstitusioanal people become important consideration based on the kedulatan of the people and the value of Democratic Elections. A single candidate in a democratic Indonesia as an anomaly in the process of the achievement of democracy. Single candidate pressing the level of kontestasi in democracy which resulted on the quality of democracy, the best solution with no single candidate come the handles.

Keywords: Systematic Interpretation, The Single Candidate, Kontestasi, Democracy

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan Hukum	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka teori	11
1. Tinjauan mengenai Demokrasi	11
2. Tinjauan mengenai Pemilihan Kepala Daerah	16
3. Tinjauan mengenai Penafsiran Hukum	23
B. Kerangka Berfikir	28
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Substansi Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015	
Terkait Syarat Jumlah Pasangan Calon	
1. Kasus Posisi Perkara No.100/PUU-XIII/2015	30
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU-XIII/2015 ditinjau dari Teori Demokrasi	44

B. Problematika yang dihadapi pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

No.100/PUU-XIII/2015 Terkait Syarat Jumlah Pasangan Calon

dan solusinya

1. Problematika yang dihadapi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
No.100/PUU-XIII/2015 Terkait Syarat Jumlah Pasangan Calon 53
2. Solusi dalam menyelesaikan Problematika yang dihadapi Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi No.100/PUU- XIII/2015 Terkait
Syarat Jumlah Pasangan Calon 58

BAB IV SIMPULAN DAN SARAN

- A. Kesimpulan 62
- B. Saran 64

DAFTAR PUSTAKA

